

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Bugha, M. D. (2010). *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: Hikmah.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Halim, A. R., & Gultom, S. S. (1987). *Sari Hukum Perburuhan Aktual*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harlandja, M. T. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Hartatik, I. P. (n.d.). *Buku Praktis*.
- Huda, N. (2008). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana.
- Irsan, K., & Armansyah. (2016). *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kasim, U. (2004). Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja. *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*.
- Lubis, S. K., & Pasaribu, K. (1996). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas'adi, G. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- MUI, T. P. (2003). *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* . Jakarta: Intermedia.
- Pujiastuti, E. (2008). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang: Semarang University Press.
- RI, D. A. (2015). *Mushaf Al-Qolam*. Jakarta Pusat: CV. Al Qolam Publishing.
- Sugiyono. (2008). *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarno. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial* . Bandar Lampung: CV. Mandar maju.
- Sumarsono, S. (2004). *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo, B. (1996). *Penetapan Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuniarsi, & Suwatno, T. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Isu Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Yustisia, T. V. (2015). *Buku Pintar Pekerja Terkena PHK*. Jakarta: Visimedia.
- Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i* . Jakarta: Almahir

JURNAL

- Komalasari, D. (2017). *Konsep Pemutusan Hubungan Kerja dalam Ekonomi Islam*. 1–84.
- Wahyuningsih, I. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemberian Uang Pesangon Sebagai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Studi Kasus Pemberian Pesangon pada Karyawan PHK di PT. Bumi Waras*

INTERNET

- Azhar, M. (2015). *Hukum Ketenagakerjaan*.
http://eprints.undip.ac.id/53755/1/Buku_Ajar_Hukum_Ketenagakerjaan.pdf
- Fahmi Pajrianto. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karyawan Atas Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Menolak Mutasi Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam* [UIN Syarif Hidayatullah].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57496/1/FahmiPajrianto - FSH.pdf>
- kemenperin. (2021, Februari Rabu). *kemenperin*. Diambil kembali dari www.kemenperin.go.id:https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf
- Makplus, O. (2015, Juli Senin). *Pengertian Hubungan Kerja Dan Perjanjian Kerja*. Retrieved from Definisi dan pengertian Menurut Ahli:
<http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/pengertian-hubungan-kerja-dan.html>
- Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang Wajib Perusahaan Ketahui*. (n.d.). Retrieved from Smart Presence:
<https://smartpresence.id/blog/pekerjaan/prosedur-pemutusan-hubungan-kerja-phk-yang-wajib-perusahaan-ketahui>
- Welianto, A. (2020, juli selasa, 14). *Ketenagakerjaan: Pengertian, kelompok dan Klasifikasi tenaga kerja*. Retrieved from [kompas.com: https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/14/130000269/ketenagakerjaan--pengertian-kelompok-dan-Klasifikasi-tenaga-kerja?page=all](https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/14/130000269/ketenagakerjaan--pengertian-kelompok-dan-Klasifikasi-tenaga-kerja?page=all)

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor: SE-05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearsah Pemutusan Hubungan Kerja;
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal;
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 (SE Menaker 3/2020);
dan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

